

# MOTIF PENOLAKAN BANGLADESH TERHADAP PENGUNGGSI ROHINGYA (*BANGLADESH REJECTION'S MOTIVES TOWARDS ROHINGYA REFUGEES*)

Oleh : Siti Aulia Nurjanah  
Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55183  
Email : [sitiaulya66@gmail.com](mailto:sitiaulya66@gmail.com)

## **Abstrack**

*This study aims to determine the motive of the refusal of Bangladesh on Rohingya refugees that occurred in 2009 to 2012. This study uses literature study were taken from a number of books, journals, websites, and quantitative data as a supporter. This study uses Decision Making Theory by Richard C. Snyder. There are internal and external factors that underlie the rejection made by Bangladesh on Rohingya refugees. Internal factors underlying the refusal of Bangladesh to Rohingyas are first, limited capability Bangladesh to accommodate and provide a decent life for the Rohingya refugees. Second, the absence of binding legal requiring Bangladesh to accommodate refugees from anywhere, including the Rohingya. Third, Rohingya refugees pose many problems penalizing the government of Bangladesh. And the external factors that underlie the refusal of Bangladesh to Rohingyas are their direct assistance from UNHCR.*

**Keywords :** *Bangladesh, Rohingya, Refugee, Rejection*

## 1. PENDAHULUAN

Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di Barat, Myanmar di Tenggara serta Teluk Bangla di Selatan. Bangladesh menempatkan diri layaknya seorang moderat dalam kebijakan luar negerinya. (Mamonto, 2011) Pada kasus pengusiran etnis yang dilakukan oleh Myanmar, Bangladesh dengan sukarela menampung para pengungsi bahkan menyediakan tempat khusus untuk para pengungsi.

Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar kedelapan di dunia. Sekitar 83% penduduk Bangladesh beragama Islam dan sekitar 16% beragama Hindu, sisanya beragama Budha, Kristen dan Animisme. Bangladesh merupakan negara berkembang. Pendapatan perkapita Bangladesh telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun 1990-an. (Mamonto, 2011)

Meningkatnya pendapatan penduduk Bangladesh dipengaruhi oleh hadirnya *Grameen Bank*. *Grameen Bank* adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh, yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan jaminan. (Grameen Bank dan Muhammad Yunus , 2014)

Melihat keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian negara, Bangladesh menjadi negara tujuan tempat pengungsian. Mayoritas pengungsi yang tinggal di Bangladesh berasal dari Myanmar, yaitu etnis Rohingya.

Pada tahun 1978 setelah dilaksanakannya Operasi Naga Min di Myanmar etnis Rohingya dipaksa untuk mencari perlindungan ke beberapa negara tetangga, seperti Thailand, Bangladesh, dan Malaysia. Pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ditujukan sebagai bentuk pembersihan etnis Rohingya. (Revolusi, 2013) Arus migrasi terbesar etnis Rohingya menuju Bangladesh, karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Menurut perkiraan, sekitar 200.000 dari

mereka tinggal di bagian barat Myanmar di perbatasan Bangladesh. (Ardiansyah, 2015)

Etnis Rohingya yang melakukan migrasi ke Bangladesh pada umumnya merupakan korban kekerasan, okupasi militer, dan pembersihan etnis. Pada awalnya Bangladesh menyambut baik kedatangan para pengungsi. Bangladesh berharap dengan adanya pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya dapat membantu meningkatkan perekonomian negaranya.

Pada tahun 1992 pemerintah Myanmar tidak henti-hentinya melakukan tindak represi terhadap Rohingya, hal ini membuat etnis Rohingya semakin merasa terintimidasi dan menimbulkan bertambahnya arus migrasi ke Bangladesh sebanyak 250.000 orang. Pemerintah Bangladesh menyediakan kamp khusus untuk para pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya menempati wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Menanggapi hal ini pada tahun 2006 pemerintah Bangladesh ber upaya membenahi kualitas tempat tinggal para pengungsi Rohingya.

Alasan lain bertambahnya jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Bangladesh disebabkan karena adanya faktor struktural yang tidak mendukung adanya Rohingya untuk berada di Myanmar, seperti tidak adanya akses terhadap kesempatan dan kebebasan dasar. Faktor kesamaan etnis dan agama membuat Rohingya merasa aman untuk menetap dan tinggal di Bangladesh. Peningkatan kualitas tempat tinggal para pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh juga mendorong Rohingya untuk datang dan menetap di Bangladesh.

Imigran paksa Rohingya yang tiba di Bangladesh tidak hanya menetap di wilayah pengungsian resmi. Banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Bangladesh tersebar pula ke dalam wilayah pengungsian tidak resmi. Populasi pengungsi Rohingya yang tinggal di wilayah pengungsian yang tidak resmi

semakin meningkat. Sedangkan populasi pengungsi Rohingya yang berada di wilayah pengungsian resmi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. (Adellia, 2013)

Pemerintah dan masyarakat Bangladesh menunjukkan reaksi penolakan terhadap Rohingya. Pada tahun 2009 terjadi kampanye anti Rohingya yang digerakkan oleh media dan elit politik untuk pertama kalinya. Aksi penolakan terhadap Rohingya semakin menghangat pada Januari 2010. Wujud penolakan terhadap etnis Rohingya ditunjukkan melalui penangkapan dan pemenjaraan sekitar 500 orang Rohingya yang berada diluar wilayah pengungsian resmi. Mengantisipasi datangnya arus migrasi yang baru, pemerintah Bangladesh merencanakan untuk menutup perbatasannya. Pemerintah Bangladesh mengkhawatirkan, arus migrasi yang baru datang akan mengundang bangkitnya Islam radikal. (Burman, 2012).

## 2. KERANGKA TEORI

Dalam teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Richrad Snyder, pengambilan keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dan keputusan politik luar negeri dipengaruhi oleh seting internal dan eksternal. Seting internal meliputi politik domestik dan politik kepartaian, opini dan sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional (kepentingan nasional). Seting eksternal menunjukkan pada faktor-faktor dan kondisi yang ada di luar wilayah teritori negara.

Faktor internal yang mendasari penolakan Bangladesh terhadap Rohingya adalah *pertama*, keterbatasan kapabilitas Bangladesh untuk menampung dan memberikan kehidupan yang layak bagi para pengungsi Rohingya. *Kedua*, tidak adanya ikatan hukum yang mengharuskan Bangladesh untuk menampung pengungsi dari manapun, termasuk etnis Rohingya. *Ketiga*, pengungsi Rohingnya menimbulkan banyak persoalan yang memberatkan bagi pemerintah Bangladesh. Dan yang

merupakan faktor eksternal yang mendasari penolakan Bangladesh terhadap Rohingya adalah adanya bantuan langsung dari UNHCR.

### **A. Keterbatasan Kapabilitas Bangladesh untuk Menampung Pengungsi Rohingya**

Permasalahan yang terjadi di Myanmar dengan etnis Rohingya membuat Bangladesh sebagai negara tetangga terkena dampak dari masalah tersebut. Etnis Rohingya yang diusir oleh Myanmar mayoritas menyelamatkan diri menuju Bangladesh. Dari tahun 1978 sampai 1992 terdapat 500.000 orang imigran asal Myanmar.

Kedatangan para pengungsi Rohingya di negara Bangladesh menambah beban bagi pemerintah Bangladesh. Karena Bangladesh merupakan salah satu negara miskin dan negara yang padat penduduk. Lebih dari separuh *Gross Domestic Product* (GDP) adalah berasal dari sektor jasa, sebanyak 45% dihasilkan Bangladesh dari sektor pertanian dengan beras sebagai produk tunggal yang paling penting.<sup>26</sup> Secara riil pendapatan perkapita Bangladesh telah tumbuh 5,8% per tahun sejak tahun 1996 meskipun ketidak stabilan politik, infrastruktur yang buruk, korupsi, pasokan listrik yang tidak memadai, dan lambat pelaksanaan reformasi ekonomi.

Dengan keadaan negara yang jauh dari kata mampu, Bangladesh diharuskan untuk menampung pengungsi Rohingya. Terlebih negara dengan kapasitas terbatas seperti Bangladesh, Bangladesh tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak pengungsi. Walaupun keadaan Bangladesh yang tidak memadai pemerintah menyediakan dua puluh kamp khusus untuk Rohingya di distrik Cox's Bazar. Cox's Bazar merupakan wilayah di Bangladesh dengan keadaan ekonomi paling buruk. Dua kamp tersebut berada di kampung Nayapara dan Kutupalong.

Penduduk setempat banyak yang tidak mau menerima pengungsi Rohingya,

pasalnya datangnya pengungsi Rohingya memperburuk lingkungan setempat. (Dien, MENGAPA BANGLADESH MENOLAK PENGUNGSI MUSLIM ROHINGYA?, 2012)

Bangladesh adalah negara dengan 132 juta penduduk dan merupakan negara berpenduduk terpadat nomor 8 di dunia. Negara yang baru 33 tahun merdeka ini memiliki pendapatan 380 US\$ pertahun. Bangladesh juga disebut sebagai ‘simbol kemiskinan Asia’. Kondisi penduduk Bangladesh yang sebagian besarnya miskin dan perekonomian negara yang lemah, membuat negara ini menjadi wilayah yang rentan konflik dan rentan akan masalah kemiskinan. Apalagi dengan melihat penduduk Bangladesh yang kebanyakan berada di daerah pegunungan dan bersuku-suku yang membuat komunikasi dan akses informasi menjadi lebih sulit. (Kertiyasa, 2014)

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971, pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat dengan lebih dari 130 persen. Tetapi walaupun sudah mengalami peningkatan ekonomi, Bangladesh tetap menjadi negara dengan kemiskinan yang cukup besar, ketimpangan sosial, kelaparan, bencana banjir, dan berbagai kekurangan lainnya. (Wardhani, 2012)

Sekitar 150 juta penduduk di Bangladesh, 80 persen diantaranya tinggal di wilayah pedesaan dengan tingkat kemiskinan diatas 40 persen. Mayoritas mata pencaharian penduduk di pedesaan adalah bertani. Walaupun begitu tidak semua penduduk di desa memiliki tanah garapan sendiri. Jadi sebagian orang tidak memiliki tanah garapan, mereka bekerja pada orang-orang elit yang memiliki tanah di pedesaan. (Kertiyasa, 2014)

Bangladesh merasa sudah tidak sanggup lagi menampung terus bertambahnya pengungsi Rohingya yang datang. Untuk menangani masalah ekonomi yang dialami penduduknya, Bangladesh merasa kesulitan. Rohingya telah menimbulkan akumulasi

dampak negatif baik politik maupun ekonomi bagi negara-negara penerima maupun komunitas Rohingya itu sendiri.

Sedikitnya persediaan sumber daya untuk dibagi, baik untuk masyarakat lokal dan orang-orang Rohingya berdampak pada ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masing-masing pihak. Terlebih tekanan komunitas internasional kepada Bangladesh untuk menyediakan sumber daya dan pelayanan berdampak negatif pada perilaku masyarakat dan pemerintah.

### **B. Tidak Ada Keterikatan Secara Hukum**

Konvensi 1951 merupakan sebuah konvensi yang berlangsung pada tanggal 28 Juli tahun 1951 di Jenewa yang membahas mengenai pengungsi dan pencari suaka. Pada konvensi tersebut terdapat sebuah teks protokol, yang berkenaan dengan status pengungsi yang terdapat pada resolusi 2198 XXI dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Konvensi itu sendiri baru berlaku pada tanggal 22 April 1954. Pada Konvensi tersebut, memuat sebuah deklarasi universal mengenai hak asasi manusia tahun 1948. Konvensi tersebut juga mengakui akan hak bagi orang-orang yang mencari suaka dari penindasan negara lain. Penekanan dari isi konvensi ini adalah, mengenai perlindungan bagi pengungsi dari kekerasan dan penganiayaan. Pada isi dari konvensi 1951 tersebut juga dikatakan, bahwa seorang pengungsi adalah seseorang yang tidak mau untuk kembali ke negara asal mereka karena berbagai alasan seperti ketakutan akibat kondisi situasi konflik dan distabilitas keamanan, penganiayaan dan diskriminasi baik ras, suku, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial tertentu, ataupun perbedaan pandangan politik.

Pemerintah-pemerintah dari dua puluh tujuh negara berikut ini diwakili oleh delegasi-delegasi yang semuanya menyampaikan surat-surat kepercayaan yang memenuhi persyaratan atau komunikasi-komunikasi yang menguasai untuk

berpartisipasi dalam Konferensi. Berikut merupakan negara-negara yang menandatangani Konvensi tersebut :

Australia	Perancis	Monacco
Austria	Jerman, Republik Federasi	Belanda
Belgia	Yunani	Norwegia
Brazil	Tahta Suci	Swedia
Kanada	Irak	Swiss (mewakili Liechtenstien)
Kolombia	Israel	Turki
Denmark	Italia	Inggris
Mesir	Luksemburg	Amerika Serikat
Venezuela	Yugoslavia	Iran

(Pengungsi, 2015)

Berdasarkan definisi pengungsi pada Konvensi 1951 tentang pengungsi, etnis Rohingya dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Hal itu dikarenakan oleh sebab-sebab berikut :

1. Etnis ini mengalami ancaman dan ketakutan yang didasari oleh Ras warna kulit, Agama, dari Negara Myanmar dan penduduk mayoritas disana. Mereka mendapat perlakuan yang tidak layak, dan tidak sesuai dengan HAM yang mendasar, seperti pekerjaan yang layak dan perlindungan di depan hukum.
2. Kemudian etnis ini menjadi orang-orang tanpa status kewarganegaraan yang jelas.
3. Terakhir mereka akan dikategorikan sebagai pengungsi ketika etnis Rohingya, menjadi manusia perahu kemudian keluar dari wilayah negara Myanmar, mencari suaka kepada negara lain dan memenuhi protokol sebagai status pengungsi. (Tampubolon, 2013)

Walaupun Rohingya sudah memenuhi kriteria dari definisi pengungsi pada Konvensi pada tahun 1951, hal tersebut mengubah keputusan Bangladesh untuk tetap menampung keberadaan pengungsi Rohingya. Karena Bangladesh bukanlah pihak yang ikut menandatangani Konvensi PBB tentang Pengungsi (*UN Convention of the Refugees*). Sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk menerima Muslim Rohingya sebagai pengungsi. (Dien, Mengapa Bangladesh Menolak Pengungsi Muslim Rohingya ?, 2012)

### **C. Pengungsi Rohingya Menimbulkan Banyak Persoalan Bagi Bangladesh**

Sejak aliran migrasi paksa kedua, Bangladesh meminta lembaga internasional, UNHCR, untuk mendaftarkan sekitar 28.000 orang Rohingya sebagai pengungsi. Namun jumlah populasi orang Rohingya meningkat pesat setelah kedatangan di tahun 1992. Kebanyakan dari orang-orang Rohingya yang tidak terdaftar sebagai pengungsi menetap di kamp pengungsian sementara. Dalam perkembangannya, kamp sementara menjadi wilayah pemukiman kumuh yang merusak lingkungan dan mengusik masyarakat lokal. (Ellgee, 2010)

Seiring berjalannya waktu, migrasi internasional dipandang sebagai masalah kemanusiaan yang kini menjadi masalah keamanan manusia. Ketidakpastian akan keberadaan Rohingya di Bangladesh akhirnya memicu sentimen dari masyarakat Bangladesh. Pada tahun 2009 terjadi kampanye anti Rohingya yang digerakkan oleh media dan elit politik untuk pertama kalinya. Aksi penolakan terhadap Rohingya semakin menghangat pada Januari 2010.

Aksi sentimen masyarakat lokal ini diwujudkan pula melalui perlawanan fisik, penangkapan dan pemenjaraan sekitar 500 orang Rohingya dari masyarakat kepada orang-orang Rohingya, khususnya yang berada di kamp-kamp sementara. Banyaknya

jumlah orang Rohingya yang menetap di Bangladesh menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal. (Burman, 2012)

Rohingya dianggap menimbulkan banyak permasalahan di wilayah Cox's Bazar dan menjadi beban bagi Bangladesh. Keberadaan orang-orang Rohingya semakin memperparah kondisi kehidupan masyarakat lokal Bangladesh dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu pekerjaan. (Ellgee, 2010)

Jumlah pengungsi tahun 2006 sampai 2010 di penampungan Nayapara dan Kutupalong mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2006 jumlah pengungsi di kedua tempat penampungan ialah 16.154 jiwa sedangkan di akhir tahun 2010 totalnya 29.016 jiwa. Ada dua kelompok yang diidentifikasi oleh UNHCR, yang pertama adalah Rohingya yang tidak resmi atau tinggal di sub-distrik Teknaf dan Ukhiya, serta 200.000 orang Rohingya yang tinggal di luar kamp-kamp ini. Kelompok kedua telah diidentifikasi oleh badan UNHCR pada Januari 2010 sebagai pengungsi, akan tetapi pemerintah Bangladesh menganggap Rohingya berdokumen migran. Sejak tahun 2006 telah terjadi peningkatan yang cukup besar dalam kualitas penampungan di kedua kamp baik kamp Nayapara ataupun kamp Kutupalong.

Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan telah meningkat tiga persen pertahun tepatnya di Teknaf dan Ukhiya, dan tingkat pengangguran dan buta huruf terdapat lebih dari 50 persen serta tingkat kelahiran dan kekurangan gizi jauh diatas rata-rata nasional. Meskipun negara Bangladesh mengalami sedikit kemajuan ekonomi, namun karena kepadatan penduduk yang lebih mengakibatkan negara Bangladesh tetap menjadi negara miskin yang sangat rawan pangan dan sulit dalam pemenuhan gizi terhadap masyarakat. Kondisi kemiskinan yang melanda negara Bangladesh ini mengakibatkan semakin melebarnya masalah yang dihadapi. Seperti yang terjadi pada tingkat kesehatan masyarakat penduduk Bangladesh sendiri dalam pemenuhan gizi.

Menurut data dari WFP, dalam kurun waktu 2008-2009 sebanyak 37 juta orang, yang merupakan seperempat dari populasi, berada dalam kondisi rawan pangan. Tingkat kekurangan gizi akut dan kronis global di antara anak di bawah umur 2 tahun di negara Bangladesh sangat mengkhawatirkan.

Kehadiran pengungsi Rohingya juga menyebabkan banyak persoalan baru di tengah-tengah masyarakat Bangladesh. Seperti ancaman keamanan. Karena hukum negara Bangladesh yang tidak mengatur hak-hak atas ribuan nasib pengungsian, hal ini menyebabkan kurang teraturnya para pengungsi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di dan di sekitar kamp. Beberapa interaksi yang dilakukan sebagian besar berdampak buruk pada masyarakat Bangladesh dan negara Bangladesh. (Adellia, Perubahan Kebijakan Pemerintah Bangladesh Terhadap Kaum Rohingya di Perbatasan Bangladesh-Myanmar, 2013)

#### **D. Adanya Bantuan Langsung dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*)**

UNHCR telah hadir di Bangladesh sejak tahun 1978 yang merupakan gelombang arus pengungsi pertama. Sebelum itu, intervensi UNHCR sangat sederhana karena hukum yang mengatur tentang pengungsi di Bangladesh ini hanya sebatas perjanjian 1993 yang tak jelas tugas dari masing masing pihak antara pemerintah dan UNHCR tersebut, dan tidak cukup dipublikasikan sehingga menyebabkan kegagalan untuk mendapatkan sejumlah data yang signifikan serta izin akses ataupun langkah-langkah dalam hal perlindungan pengungsi dan solusi.

Pada Tahun 2006 UNHCR mengeluarkan UNJI sebagai rancangan program yang bergerak dalam bidang penanganan kasus pengungsi di Bangladesh, tepatnya saat gelombang ketiga arus pengungsi di Bangladesh. Dimana pemerintah bersedia menerima bantuan teknis dan dukungan keuangan kepada masyarakat karena melihat

kondisi masuknya pengungsi telah menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan infrastruktur lainnya. Sedangkan pelaksanaan program UNJI ini sendiri dilakukan oleh beberapa kelompok Organisasi Internasional yang selama ini sangat berkaitan penuh dalam penanganan kasus etnis Rohingya. Diantaranya ialah *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, *The World Food Program (WFP)*, *The United Nations Children's Fund (UNICEF)*, *United Nations Development Programme (UNDP)* dan *The United Nations Population Fund (UNFPA)*. (Olivia, 2012)

Namun pada januari 2011 pemerintah Bangladesh mengambil keputusan untuk menolak bantuan dari UNJI. Penolakan bantuan UNJI ini timbul berdasarkan berbagai macam persepsi pemerintah Bangladesh. Karena UNJI dianggap hanya memberikan keuntungan pada pengungsi saja. Segala bantuan mengarah pada pengungsi, dan tidak memperhatikan dampak yang timbul pada masyarakat lokal. Program-program yang dilaksanakan oleh UNJI mengarah pada faktor umpan tarik atau penambahan minat orang-orang Rohingya datang kembali untuk menjadi pengungsi di Bangladesh. (Olivia, 2012)

## **2. METODOLOGI**

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yang diambil dari sejumlah buku, jurnal, website, dan data-data kuantitatif sebagai penunjang.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Teori yang dikemukakan oleh Richard Snyder digunakan oleh penulis untuk menjelaskan tentang apa saja motif penolakan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya yang menitik beratkan pada seting internal dan eksternal. Dalam peristiwa ini masyarakat Bangladesh merasa banyak dirugikan dengan datangnya pengungsi Rohingya. Peningkatan pengungsi Rohingnya di setiap tahunnya membuat penduduk

lokal merasa terganggu, karena populasi Rohingya yang menetap di kampung pengungsian tidak resmi semakin meningkat.

Faktor internal yang mendasari penolakan Bangladesh terhadap Rohingya adalah keterbatasan kapabilitas Bangladesh untuk menampung dan memberikan kehidupan yang layak bagi para pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingnya menimbulkan banyak persoalan yang memberatkan bagi pemerintah Bangladesh. Masyarakat Bangladesh membentuk gerakan anti Rohingya serta melakukan penangkapan dan pemenjaraan pengungsi Rohingya sekitar 500 orang sebagai bentuk penolakan pengungsi Rohingya. Melihat reaksi yang ditimbulkan oleh rakyatnya, pemerintah Bangladesh berencana untuk menutup perbatasannya. Sikap keras Bangladesh juga ditunjukkan melalui penolakan masuknya bantuan-bantuan dari lembaga internasional. Pemerintah Bangladesh merasa mereka tidak mampu lagi untuk menanggung lebih banyak orang Rohingya di wilayahnya. (Adellia, Perubahan kebijakan pemerintah bangladesh terhadap kaum rohingya di perbatasan bangladesh-myanmar, 2013)

Selain itu Bangladesh juga tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menampung pengungsi Rohingya, karena Bangladesh bukanlah merupakan negara ikut menandatangani Konvensi tahun 1951 yang berkenaan tentang status para pengungsi.

Sedangkan faktor eksternal yang mendasari penolakan Bangladesh adalah adanya bantuan langsung dari UNHCR yang ditujukan pada Rohingya.

#### **4. KESIMPULAN**

Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di Barat, Myanmar di Tenggara serta Teluk Bangla di Selatan.

Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar kedelapan di dunia. Sekitar 83% penduduk Bangladesh beragama Islam dan sekitar 16% beragama Hindu, sisanya beragama Budha, Kristen dan Animisme. Bangladesh merupakan negara berkembang.

Saat bencana kelaparan di tahun 1974 sedang melanda Bangladesh, Yunus berpandangan bahwa selama ini segala macam teori ekonomi klasik maupun modern yang secara elegan di ajarkan di kampus tidak bisa menjawab permasalahan sosial di negaranya, tidak hanya kelaparan namun juga kemiskinan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya.

Melihat keadaan yang semakin parah, Yunus memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil masyarakat yang mengalami kelaparan dan kemiskinan. Pendapatan perkapita Bangladesh telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun 1990-an.

Hubungan luar negeri Bangladesh yang paling penting adalah hubungan dengan Myanmar. Hubungan antara Bangladesh dan Myanmar secara resmi mulai pada 13 Januari 1972, tanggal dimana Myanmar diakui Bangladesh sebagai negara yang berdaulat.

Kedekatan geografis antara Bangladesh dengan Myanmar membuat kedua negara tersebut secara ideal dapat saling memanfaatkan sumber daya alam masing-masing demi memperoleh keuntungan bersama. Sebuah perjanjian perdagangan umum antara Bangladesh dan Myanmar ditanda tangani pada tanggal 3 Agustus 1973 yang setiap tahunnya dilakukan pembaharuan.

Tetapi baru pada tanggal 5 September 1995 perdagangan di perbatasan secara resmi dimulai. Potensi kerja sama antar kedua negara tetangga tersebut terlihat menjanjikan. Kedua negara tersebut berfokus pada perdagangan di perbatasan.

Rohingya adalah nama sebuah etnis di Arakan, Myanmar Utara, yang terpinggirkan oleh pemerintahan junta militer. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak bernegara dan tidak diakui secara penuh kewarganegaraannya oleh pemerintah Burma.

Pada tahun 1978 setelah dilaksanakannya Operasi Naga Min di Myanmar etnis Rohingya dipaksa untuk mencari perlindungan ke beberapa negara tetangga, seperti Thailand, Bangladesh, dan Malaysia. Pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ditujukan sebagai bentuk pembersihan etnis Rohingya. Arus migrasi terbesar etnis Rohingya menuju Bangladesh, karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Menurut perkiraan, sekitar 200.000 dari mereka tinggal di bagian barat Myanmar di perbatasan Bangladesh.

Pada awalnya Bangladesh menyambut baik kedatangan para pengungsi Rohingya dan pemerintah Bangladesh berharap dapat mengatasi persoalan ini melalui diplomasi dengan pemerintah Myanmar.

Pada tahun 1992 pemerintah Myanmar tidak henti-hentinya melakukan tindak represi terhadap Rohingya, hal ini membuat etnis Rohingya semakin merasa terintimidasi dan menimbulkan bertambahnya arus migrasi ke Bangladesh sebanyak 250.000 orang. Pada bulan Mei tahun 1993, UNHCR menandatangani perjanjian atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pemerintah Bangladesh. Perjanjian itu dibentuk atas dasar keterlibatan UNHCR dalam proses pemulangan kembali pengungsi sekitar 245.000 orang ke Myanmar pada gelombang kedua secara sukarela.

Pemerintah Bangladesh menyediakan kamp khusus untuk para pengungsi Rohingya. Kamp yang disediakan oleh Bangladesh tentu tidak nyaman tempat tinggal mereka, tentunya dengan berbagai keterbatasan. Pada tahun 2006 pemerintah Bangladesh ber upaya membenahi kualitas tempat tinggal para pengungsi Rohingya.

Bangladesh tidak lagi mau memberikan status pengungsi pada orang Rohingya yang masuk ke perbatasan. Penolakan Bangladesh terhadap Rohingya ditunjukkan dengan beberapa peristiwa, antara lain:

1. Memperketat patroli perbatasan.
2. Menghentikan pasokan bantuan Internasional.

Bangladesh berharap dengan adanya pengungsi Rohingya dapat membantu meningkatkan keadaan ekonomi negara. Selain itu letak geografis antara Bangladesh dengan Myanmar yang berdekatan.

Ternyata anggapan Bangladesh mengenai Rohingya dapat membantu perekonomian negara adalah salah besar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan harapan Bangladesh. Pengungsi Rohingya yang datang justru banyak memberikan banyak masalah pada Bangladesh.

Dalam teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Richard Snyder, pengambilan keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dan keputusan politik luar negeri dipengaruhi oleh setting internal dan eksternal.

Terdapat faktor internal dan eksternal dalam penolakan yang dilakukan Bangladesh terhadap Rohingya pada tahun 2009. Faktor internal yang mendasari penolakan Bangladesh terhadap Rohingya adalah *pertama*, keterbatasan kapabilitas Bangladesh untuk menampung dan memberikan kehidupan yang layak bagi para pengungsi Rohingya. *Kedua*, tidak adanya ikatan hukum yang mengharuskan Bangladesh untuk menampung pengungsi dari manapun, termasuk etnis Rohingya. *Ketiga*, pengungsi Rohingnya menimbulkan banyak persoalan yang memberatkan bagi pemerintah Bangladesh. Dan yang merupakan faktor eksternal yang mendasari penolakan Bangladesh terhadap Rohingya adalah adanya bantuan langsung dari UNHCR.

## Bibliography

- Mamonto, S. M. (2011, April 27). *PROFIL NEGARA BANGLADESH DENGAN STUDI KASUSSENKETA TELUK BENGKALA*. Retrieved November 27, 2015, from DocSlide: <http://dokumen.tips/documents/studi-kasus-bangladesh.html>
- Grameen Bank dan Muhammad Yunus* . (2014, November 25). Retrieved November 27, 2015, from Sejarah Negara: <http://www.sejarah-negara.com/2014/11/grameen-bank-dan-muhammad-yunus.html>
- Burman, S. (2012, agustus 07). *Bangladesh Perketat Kebijakan Pengungsi asal Myanmar*. Retrieved november 05, 2015, from Dw made for minds: <http://www.dw.com/id/bangladesh-perketat-kebijakan-pengungsi-asal-myanmar/a-16150361>
- Revolusi, A. (2013, November 30). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ETNIS RAKHINE DAN ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2012. *Universitas Jember Digital Repository* .
- Ardiansyah, F. (2015, Mei 25). *Sekilas Sejarah tentang Imigran Rohingya*. Retrieved November 06, 2015, from okezone.com: <http://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154652/sekilas-sejarah-tentang-imigran-rohingya>
- Adellia, C. (2013, Maret). Perubahan kebijakan pemerintah bangladesh terhadap kaum rohingya di perbatasan bangladesh-myanmar. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* .
- Dien, H. A. (2012, 06 20). *MENGAPA BANGLADESH MENOLAK PENGUNGSI MUSLIM ROHINGYA?* Retrieved 03 25, 2016, from GlobalMuslim Community: <http://www.globalmuslim.web.id/2012/08/mengapa-bangladesh-menolak-pengungsi.html>
- Adellia, C. (2013, 03). Perubahan Kebijakan Pemerintah Bangladesh Terhadap Kaum Rohingya di Perbatasan Bangladesh-Myanmar. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* , 17.
- Kertiyasa, M. B. (2014, 07 18). *5 Negara dengan Penduduk Miskin Terbanyak*. Retrieved 03 24, 2016, from Okezone.com: <http://economy.okezone.com/read/2014/07/17/213/1014116/5-negara-dengan-penduduk-miskin-terbanyak>

- Wardhani, B. (2012, 10 16). Pengungsi Rohingya di Perbatasan Myanmar-Bangladesh. 11.
- Kamel, T. (2015). *Bangladesh Unemployment Summary*. Retrieved 04 2016, from Quandl: <https://www.quandl.com/collections/bangladesh/bangladesh-unemployment>
- Prasojo, H. (2015, 06 10). *Australia Sebagai Negara yang Meratifikasi The United Nations 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*. Retrieved 03 29, 2016, from Ilmu Hubungan Internasional: <http://www.haryoprasodjo.com/2015/10/australia-sebagai-negara-yang.html>
- Pengungsi, K. K.-B. (2015, 07). *Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi*. Retrieved 03 29, 2016, from [https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2015/07/konvensi\\_dan\\_protokol.pdf](https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2015/07/konvensi_dan_protokol.pdf)
- Tampubolon. (2013, 03). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM DI ASEAN TERHADAP MANUSIA PERAHU ROHINGYA DALAM STATUS SEBAGAI PENGUNGI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. 16.
- Dien, H. A. (2012, 06 20). *Mengapa Banglades Menolak Pengungsi Muslim Rohingya ?* Retrieved 03 25, 2016, from GlobalMuslim Community: <http://www.globalmuslim.web.id/2012/08/mengapa-bangladesh-menolak-pengungsi.html>
- Ellgee, A. (2010, September). *Resentment of Rohingya refugees in Bangladesh is giving rise to highly organized and increasingly vocal resistance to their presence*. Retrieved from The Irrawaddy: [http://www2.irrawaddy.com/print\\_article.php?art\\_id=19397](http://www2.irrawaddy.com/print_article.php?art_id=19397)
- Olivia, Y. (2012). Sikap Bangladesh dalam Menangani Program UNHCR "United Nations Joint Initiative" terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya periode (2006-2011). *Jurnal transnasional* , 06.
- Nugraha, F. (2013, 11 09). *Bangladesh Segera Tutup Perbatasan dengan Myanmar* . Retrieved 02 2016, from Okezone.com: <http://news.okezone.com/read/2013/11/09/413/894328/bangladesh-segera-tutup-perbatasan-dengan-myanmar>